



Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)

Perlindungan Hukum untuk Penyandang Cacat	A.R. Budiono S. Rahadjo	125
Pengaruh Keberhasilan Pembangunan Ekonomi terhadap Penurunan Angka Kelahiran (TFR) di Propinsi Jawa Timur	M. Saleh	132
Bahasa Inggris untuk Program Studi S-1 Non Bahasa di Universitas Brawijaya: Sebuah Upaya Penyeimbangan Konstrain Kebijakan dan Pragmatik dalam Tahap Perencanaan Pengembangan Kurikulum	I. Winarni, E. Sadtono, P. Setijiono, S.E. Tabiati, R. Ratnawati	140
Studi Korelasi Antara Tingkat Pendidikan Masyarakat dengan Partisipasi Politik di Kelurahan Lempake	DB. Paranoan ✓	151
Pengaruh Jaringan Sosial terhadap Penetapan Harga pada Pedagang Asongan	Z. Arifin, H. Nayati Utami, Salehuddin	160
Potensi Wanita Rumah Tangga Nelayan dalam Menumbuhkembangkan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Kasus pada Desa Nelayan Randu Putih Kecamatan Dringu Pemerintah Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur)	A. Suryono	173
Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Lembaga Informal (Studi Alternatif Model Penyelesaian Sengketa Tanah yang Efektif di Kabupaten Tuban)	Nurdin S. Widagdo	181
Kendala Program Jaring Pengaman Sosial dalam Mendukung Kelangsungan Proses Belajar Mengajar Anak-Anak Keluarga Miskin Tingkat SLTP di Perkotaan Jawa Timur	K. Ashar, W. Savitri	189
Wanita Kaili Pengrajin Tenun Kain Sutra dan Permasalahannya	D. Syuaib	195
Dualisme Penyelesaian Hukum dalam Kasus dan Sengketa Harta Warisan di Kalangan Masyarakat Islam (Study dalam Perspektif Wanita Islam setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)	S. Kustina	206
Pengaruh Faktor Pemasaran terhadap Strategi Perusahaan pada Industri Plywood di Kalimantan Timur	Suharno	215
Prostitusi Terselubung di Kalangan Mahasiswi di Kawasan Kota Malang dan Surabaya (Studi tentang Faktor Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Mahasiswi dan Organisasi Wanita)	M.H. Syafioedin	240

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. Bambang Guritno (Rektor)

Wakil

Prof. Dr. Ir. H. Luqman Hakim, M.S. (Ketua Lembaga Penelitian)

DEWAN REDAKSI

Ketua,

Prof. Dr. M. Syafi'i Idrus, S.E., M.Ec. (Ilmu Manajemen Kuantitatif)

Anggota,

Prof. Dr. Ir. H.M. Iksan Semaoen, M.Sc. (Ekonomi Pertanian)

Prof. Dr. Umar Nimran, M.A. (Manajemen Sumberdaya Manusia)

Prof. Dr. Moch. Munir, S.H. (Ilmu Hukum Perdata)

Dr. Sumartono, M.S. (Reformasi Administrasi Negara)

Dr. Agus Suman, S.E., DEA. (Ekonomi Pembangunan)

Alamat Redaksi/Penerbit:

Lembaga Penelitian, Universitas Brawijaya

Jalan Veteran, Malang 65145

Telp. (0341) 551611 psw. 301, 575824. Fax. (0341) 575828

E-mail lemlitub@malang.wasantara.net.id.

STUDI KORELASI ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DENGAN PARTISIPASI POLITIK DI KELURAHAN LEMPAKE

DB. Paranoan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian studi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan partisipasi politik di kelurahan lempake bertujuan: 1) Mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dengan partisipasi politik masyarakat Desa Lempake, 2) Menguji teori hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Tingkat pendidikan masyarakat desa Lempake sampai saat ini masih termasuk dalam kategori sedang. Faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat adalah masih rendahnya tingkat pendapatan keluarga. Sedangkan Tingkat partisipasi politik masyarakat desa Lempake termasuk dalam kategori sedang. (2) Dari hasil analisis data diketahui bahwa nilai r hitung ternyata lebih besar dibandingkn nilai r tabel, hal ini mengandung arti bahwa pada taraf signifikan 5% ternyata antara variabel tingkat pendidikan dengan variabel partisipasi politik masyarakat terdapat hubungan yang positif.

Kata kunci : Tingkat Pendidikan, Partisipasi Politik

A STUDY INTO THE CORRELATION BETWEEN EDUCATION LEVELS AND PARTICIPATION IN LEMPAKE VILLAGE

ABSTRACT

The aims of this study were to research the affects of educational levels on active participation in politics, and to test the theory of the relationship between educational levels and participation in politics. This study was conducted in Lempake village.

The results were as follows : (1) that at present the educational levels of the Lempake villagers were still relatively low, and that this was mainly due to low income per capita. (2) That active political participation levels were also relatively low. (3) that analyses of the data found that the value of the r calculated was higher than that for the table value for r , this means that the 5% significance level between the variables for educational levels and political participation had a positive relationship.

Keywords : Educational level, Participation political.

PENDAHULUAN

Propinsi Kalimantan Timur yang terkenal kaya akan sumberdaya alamnya (SDA) secara Nasional ternyata telah mampu memberikan ironisnya, propinsi yang kaya ini dengan jumlah penduduknya yang relatif masih kecil ternyata dalam pelaksanaan pembangunannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan propinsi lainnya (terutama propinsi yang berada di Jawa). Pelaksanaan pembangunan selama lebih dari 3 (tiga) dasa warsa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, ternyata telah meninggalkan bekas yang tidak signifikan. Kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana akibat eksploitasi yang berlebihan, jumlah desa-desa miskin masih besar (78%), tingkat kesejahteraan penduduk yang masih jauh dari harapan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah dan lain sebagainya.

Hal ini diakibatkan karena Pemerintah Pusat pada waktu itu tidak memberikan ruang gerak yang luas kepada pemerintah daerah untuk berkreasi, berinisiatif menurut potensi dan aspirasi masyarakatnya. Pada pemerintahan Orde Baru telah terjadi "pemasangan kreatifitas daerah" hampir sebagian besar perencanaan pembangunan daerah ditentukan oleh pusat.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (otonomi daerah) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah nampaknya telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk segera menata kembali berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya di berbagai bidang dan sektor yang bertumpu pada potensi dan aspirasi yang dimiliki serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Kedua Undang-undang tersebut di atas, pada esensinya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan melaksanakan serta mengawasi pembangunan di berbagai bidang dan sektor agar lebih efektif dan efisien serta lebih dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya kedua Undang-undang tersebut di atas, merupakan peluang dan sekaligus juga tantangan. Sebagai peluang, karena dengan lahirnya undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan sektor yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, ruang gerak untuk timbulnya inovasi baru, inisiatif serta kreativitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih besar. Namun di sisi lain pelaksanaan otonomi daerah akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan bila dibarengi dengan tersedianya kualitas sumber daya manusia yang memadai, padahal jelas sekali untuk kualitas sumber daya manusia di wilayah ini masih tergolong rendah.

Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas utama untuk dikembangkan. Selain itu, menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk juga didalamnya peningkatan partisipasi politik menjadi elemen penting dalam otonomi daerah.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan lain-lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa warga negara, mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan atau masalah-masalah negara/daerah. Selain itu, semakin banyak warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik akan semakin baik, dengan demikian pimpinan negara/ pemerintah akan mendapat masukan yang lebih banyak dari masyarakat. Dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat maka pimpinan-pimpinan lembaga kenegaraan dalam pengambilan keputusannya akan selalu berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, di-

mana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada hakekatnya harus berasal dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, seperti misalnya, struktur ekonomi masyarakat, tingkat pendapatan/kesejahteraan masyarakat, moral, tradisi atau adat istiadat yang berlaku, keterbukaan lembaga-lembaga formal. Dari sekian faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, faktor tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi politik. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Bintoro Tjokroamidjojo, bahwa tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara, dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Permasalahannya kini adalah, apakah benar bahwa tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi politiknya?

Tentunya untuk menjawab masalah ini diperlukan penelitian. Untuk kepentingan penelitian ini penulis mengadakan penelitian dengan judul Korelasi Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Politik Di Desa Lempake. Dengan demikian permasalahan penelitian ini secara rinci dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat Desa Lempake ?
2. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat politik masyarakat Desa Lempake ?
3. Apakah tingkat pendidikan masyarakat berkorelasi positif terhadap tingkat partisipasi politik?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dengan partisipasi politik masyarakat Desa Lempake, 2) Menguji teori hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik.

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat berguna untuk : 1) Sebagai bahan informasi bagi

pemerintahan desa mengenai pengembangan partisipasi masyarakat, 2) Menambah jumlah referensi kepustakaan politik, 3) Acuan bagi peneliti berikut yang tertarik dalam pengembangan teori partisipasi masyarakat, 4) Bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menilai tingkat partisipasinya dalam politik.

METODOLOGI

Lokasi penelitian di wilayah desa Lempake, adapun pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu: 1) Desa Lempake merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kotamadya Samarinda, dimana menurut hasil pengamatan pendahuluan termasuk salah satu desa yang tingkat partisipasi politiknya cukup tinggi. 2) Lokasi Desa Lempake mudah dijangkau. Adapun yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh penduduk Desa Lempake yang telah berumur 17 tahun ke atas.

Hal ini berdasarkan pada pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1975 dimana disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mempunyai hak memilih adalah sudah berumur 17 tahun ke atas pada waktu pendaftaran pemilih.

Desa Lempake terdiri dari 7 dusun yaitu, dusun Kebon Agung, Dusun Sukorejo, Dusun Purwosari, Dusun Girirejo, Dusun Lempake Jaya, Dusun Talangsari dan Dusun Joyomulyo. Dari 7 dusun tersebut diambil 2 sampel lokasi secara acak, dimana terpilih Dusun Girirejo dan Dusun Kebon Agung. Dari dua dusun tersebut terdapat jumlah populasinya sebesar 602 orang, untuk kepentingan penelitian penulis hanya mengambil sampel secara acak sederhana sebesar 10%. Dengan demikian jumlah sampel penelitian ini seluruhnya 60 orang.

Alat Pengukur Data

Variabel bebas dan variabel tergantung pada penelitian ini akan diukur lewat indikator yang berskala ordinal, yaitu setiap jawaban yang telah disediakan oleh peneliti diurutkan ke dalam 5 jenjang (skala Likert) dimana setiap jenjang

jawaban diberikan skor sebagai berikut : jawaban a diberi skor 5, jawaban b diberi skor 4, jawaban c diberi skor 3, jawaban d diberi skor 2 dan jawaban e diberi skor 1. Untuk mengetahui apakah skor yang didapat oleh seorang responden termasuk kategori tinggi sekali, tinggi, cukup tinggi, kurang, rendah ditentukan dengan kelas kategori : 1-1,80 = rendah sekali; 1,81-2,60 = rendah; 2,61-3,40 = sedang; 3,41-4,20 = tinggi; 4,21-5,00 = tinggi sekali.

Teknik Pengumpulan data

Data penelitian ini dikumpulkan lewat alat pengumpul data sebagai berikut: Kuesioner (berupa angket), wawancara, pengamatan secara langsung di lapangan, penelitian dokumen. Untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima atau ditolak digunakan koefisien korelasi product moment. Untuk mengetahui apakah dua variabel penelitian tersebut (tingkat pendidikan dan partisipasi politik) berhubungan secara signifikan atau tidak digunakan uji F test. Untuk mengetahui apakah hipotesis kerja diterima maka digunakan kriteria sebagai berikut : 1) apabila $r_{empiris} \geq r_{tabel}$ maka H_0 diterima, 2) apabila $r_{empiris} < r_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Kemudian untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel x dengan variabel y digunakan kriteria dari Guilford sebagai berikut: 1) Kurang dari 0,20 hubungannya rendah sekali, 2) 0,20-0,40 hubungannya rendah tapi pasti, 3) 0,40-0,70 hubungan cukup berarti. 4) 0,70-0,90 hubungan kuat, 5) Lebih dari 0,90 hubungan kuat sekali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran tingkat pendidikan responden seperti terlihat pada Tabel 1.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa dari sampel penelitian yang berjumlah 60 responden ternyata terdapat 4 responden yang tidak memiliki ijazah, 10 responden lulusan SD, 31 responden lulusan SLTP, 41 responden berpendidikan SLTA dan 1 orang berpendidikan

diploma. Berdasar data tersebut dapat disimpulkan secara umum tingkat pendidikan responden adalah SLTP, dan dilihat rata-ratanya adalah 178 (total Skor) : 60 = 2,97. Jika dilihat pada interval yang telah ditetapkan terdahulu maka nilai 2,97 ini terdapat diantara kelas kategori sedang yaitu terletak antara kelas kategori 2,61 – 3,40. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan masyarakat desa Lempake ini termasuk ke dalam kategori sedang.

Tabel. 1. Gambaran Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat pendidikan	Frek	%	Skor	Total Skor
1.	Tidak punya ijazah	4	6,66	1	4
2.	SD	10	16,67	2	20
3.	SLTP	31	51,67	3	93
4.	SLTA	14	23,33	4	56
5.	Diploma	1	1,67	5	5
		60	100		178

Sumber : Hasil Kuesioner

Partisipasi Politik

Adapun indikator yang diukur dari partisipasi politik (variabel tergantung) dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Keikutsertaan dalam anggota partai politik / kelompok kepentingan,
- 2) Keikutsertaan dalam rapat-rapat politik
- 3) Keikutsertaan dalam diskusi-diskusi politik (seminar politik),
- 4) Keikutsertaan dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah
- 5) Keikutsertaan dalam kampanye
- 6) Keikutsertaan memberikan suara dalam pemilihan umum,
- 7) Mengikuti perkembangan politik di media massa.

■ **Keikutsertaan dalam anggota partai politik/ kelompok kepentingan**

Untuk mengetahui sejauh mana keikutsertaan responden dalam keanggotaan partai politik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Keikutsertaan responden dalam keanggotaan partai politik

No	Jawaban responden	Frek	%	Skor	Total Skor
1.	Aktif sekali	0	0,00	5	0
2.	Aktif	7	11,66	4	28
3.	Kadang aktif	33	55,00	3	99
4.	Jarang aktif	10	16,67	2	20
5.	Tidak aktif	10	16,67	1	10
		60	100		157

Sumber : Hasil Jawaban Responden tahun 2000

Dari 60 responden yang diteliti terdapat 11,66% tergolong aktif, 55% kadang-kadang aktif, 16,67% jarang aktif dan 16,6 % tidak aktif. Di sini terlihat sebagian besar responden tergolong aktif dalam keanggotaan partai politik. Dari seluruh responden yang diteliti terlihat total skor yang dicapai 157 dengan nilai rata-rata sebesar 2,62 atau termasuk kedalam kategori sedang. Situasi politik dalam keanggotaan suatu partai politik di wilayah ini sangat tergantung pada situasi politik yang berkembang. Pada masa akan diadakannya Pemilihan Umum keanggotaan dan kegiatan setiap partai yang ada di wilayah ini menjadi meningkat, namun bila sudah selesai Pemilu maka aktifitas anggota politik baik kualitas dan intensitasnya menjadi berkurang.

■ Keikutsertaan dalam rapat-rapat politik

Untuk mengetahui sejauh mana keikutsertaan masyarakat Lempake dalam rapat-rapat politik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Keikutsertaan dalam rapat-rapat politik

No	Jawaban responden	Frek	%	Skor	Total Skor
1.	Sering Sekali	0	0,00	5	0
2.	Sering	4	6,67	4	16
3.	Kadang-kadang	33	55,00	3	99
4.	Jarang sekali	12	20,00	2	24
5.	Tidak Pernah	11	18,33	1	11
		60	100		150

Sumber : Hasil Jawaban Responden tahun 2000

Berdasar tabel di atas terlihat bahwa dari 60 responden yang diteliti menyatakan bahwa sebanyak 4 responden menjawab sering mengikuti kegiatan rapat-rapat politik, kemudian menjawab kadang-kadang sebanyak 33 responden (55%), jarang sekali ikut dalam rapat politik sebanyak 12 responden dan sisanya sebanyak 6 responden menyatakan tidak pernah ikut serta kegiatan rapat politik. Dari data terlihat modus Jawaban responden berada pada kategori kadang-kadang. Sedangkan jika dihitung dengan nilai rata-rata yang dicapai oleh 60 responden tersebut sebesar $150 : 60 = 2,50$. Nilai rata-rata ini berada pada interval 1,81 – 2,60 termasuk pada kategori rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk indikator keikutsertaan masyarakat desa Lempake dalam kegiatan rapat-rapat politik termasuk dalam kategori rendah.

■ Keikutsertaan dalam diskusi-diskusi politik (seminar politik)

Untuk mengetahui sejauh mana keikutsertaan responden dalam diskusi/seminar politik dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Keikutsertaan responden dalam diskusi/seminar politik

No	Jawaban responden	Frek	%	Skor	Total Skor
1.	Sering sekali	0	0,00	5	0
2.	Sering	4	6,67	4	16
3.	Kadang	23	38,33	3	69
4.	Jarang sekali	2	36,67	2	44
5.	Tidak pernah	11	18,33	1	11
		60	100		140

Sumber : Hasil Jawaban Responden tahun 2000

Keikutsertaan responden dalam diskusi/seminar politik menunjukkan bahwa terdapat 4 responden atau 6,67% memberikan jawaban sering mengikuti diskusi atau seminar tentang politik, 23 responden atau 38,33% memberikan jawaban kadang-kadang, dan 22 responden memberikan jawaban jarang sekali mengikuti diskusi atau seminar politik, 11 responden yang menyata-

kan tidak pernah ikut serta dalam kegiatan diskusi atau seminar politik. Berdasarkan data tersebut maka modus jawaban responden berada pada jawaban kadang-kadang, sedangkan bila dilihat dari rata-rata skor yang diperoleh adalah sebesar 2,33 nilai ini berada pada antara 1,81-2,60 atau termasuk pada level rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Lempake dalam kegiatan diskusi atau seminar-seminar politik masih termasuk dalam kategori rendah. Data ini merupakan masukan bagi pemerintah desa khususnya, bagaimana kelak indikasi ini dapat lebih ditingkatkan. Karena dengan rendahnya partisipasi dalam diskusi atau seminar politik ini maka kebutuhan, aspirasi, saran serta masalah yang secara nyata mereka rasakan langsung menjadi tidak terakomodir oleh pemerintah. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat itu sendiri.

■ **Keikutsertaan dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah**

Untuk mengetahui sejauh mana keikutsertaan responden dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Keikutsertaan responden dalam Pertemuan dengan Pejabat Pemerintah

No	Jawaban responden	Skor	Frekuensi		Prosentase		Total Skor	
1	Sering sekali	5	0	0	0	0	0	0
2	Sering	4	2	3	3,33	5,0	8	12
3	Kadang	3	28	32	46,47	53,33	84	96
4	Jarang sekali	2	19	14	31,67	23,24	38	28
5	Tidak pernah	1	11	11	18,33	18,33	11	11
			60	60	100	100	141	147

Sumber : Hasil Jawaban Responden tahun 2000

Keikutsertaan Responden dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah menunjukkan bahwa dari 60 responden yang diteliti ternyata untuk keikutsertaan dalam pertemuan dengan pejabat serta sering tidaknya memberikan gagasan atau usulan dalam pertemuan itu terlihat modusnya berada pada kategori kadang-kadang. Jika dilihat

nilai rata-ratanya adalah sebesar 2,40 masih termasuk dalam kategori rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat desa Lempake ternyata belum mampu memanfaatkan momen-momen tepat untuk menyalurkan aspirasinya, pada-hal kesempatan itu sering sekali ada dihadapan masyarakat desa. Karena masyarakat belum memiliki keberanian untuk mengungkapkan keinginannya atau masalah-masalah yang dihadapinya kepada pejabat pemerintah secara langsung maka berakibatnya aspirasi mereka tidak tertangkap oleh pejabat pemerintah.

■ **Keikutsertaan responden dalam berkampanye**

Keikutsertaan responden dalam menghadiri kampanye dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Keikutsertaan responden dalam menghadiri kampanye

No	Jawaban responden	Frek	%	Skor	Total Skor
1.	Sering sekali	0	0,00	5	0
2.	Sering	4	6,67	4	16
3.	Kadang	35	58,33	3	105
4.	Jarang sekali	20	33,33	2	40
5.	Tidak pernah	1	1,67	1	1
		60	100		162

Sumber : Hasil Jawaban Responden tahun 2000

Keikutsertaan responden dalam menghadiri berkampanye politik menunjukkan bahwa dari 60 responden yang diteliti ternyata modus jawabannya berada pada kategori kadang-kadang atau dengan menghitung nilai rata-rata didapatkan $162:60 = 2,70$ atau termasuk dalam kategori sedang.

Keikutsertaan responden dalam kampanye merupakan indikasi untuk melihat tingkat partisipasi politik masyarakat, sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik menjadi lebih meningkat karena kampanye politik merupakan sarana di dalam pendidikan politik. Semakin sering orang mengikuti kampanye

politik maka pemahaman akan pentingnya politik semakin dalam.

Keikutsertaan responden dalam memberikan suara pada pemilihan umum

Keikutsertaan responden dalam memberikan suara pada pemilihan umum dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tanggapan responden tentang penting tidaknya memberikan suara dalam pemilihan umum

No	Jawaban responden	Frek	%	Skor	Total Skor
1.	Perlu sekali	0	0	5	0
2.	Perlu	4	6,67	4	16
3.	Cukup perlu	35	58,33	3	105
4.	Kurang perlu	20	33,33	2	40
5.	Tidak perlu	1	1,67	1	1
		60	100		162

Sumber : Hasil Jawaban Responden tahun 2000

Keikutsertaan memberikan suara dalam pemilihan umum menunjukkan bahwa dari 60 responden yang diteliti ternyata 7 responden memberikan jawaban perlu, 30 responden menyatakan cukup perlu, 20 responden menyatakan kurang perlu dan sisanya 3 responden menyatakan tidak perlu. Dari data ini dapat dilihat jawaban terbanyak ternyata pada jawaban cukup perlu (50%), kemudian bila dilihat nilai rata-ratanya didapat sebesar 2,68 artinya berada di dalam kategori sedang. Dengan demikian untuk indikator ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat desa Lempake sudah termasuk dalam kategori cukup baik.

Mengikuti perkembangan politik di media massa

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran responden mengikuti perkembangan politik di media massa dapat dilihat pada Tabel 8.

Keikutsertaan responden mengikuti perkembangan politik di media massa menunjukkan bahwa dari 60 responden yang diteliti menjawab

sering sebanyak 29 responden dan sebanyak 26 responden menjawab kadang-kadang, 1 responden sering sekali, 3 responden jarang sekali dan 1 responden tidak pernah. Jika dilihat nilai rata-ratanya sebesar 3,38 maka nilai ini termasuk dalam kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Lempake Kotamadya Samarinda dalam mengikuti perkembangan politik melalui media massa sudah termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Tabel 8. Keikutsertaan Responden dalam perkembangan politik di media massa

No	Jawaban responden	Frek	%	Skor	Total Skor
1.	Sering sekali	1	1,67	5	5
2.	Sering	29	48,33	4	87
3.	Kadang	26	43,33	3	104
4.	Jarang sekali	3	5,00	2	6
5.	Tidak pernah	1	1,67	1	1
		60	100		150

Sumber : Hasil Jawaban Responden tahun 2000

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat gambaran umum tingkat pendidikan masyarakat desa lempake masih termasuk pada kategori sedang, hasil pengamatan penulis menunjukkan sebenarnya motivasi keluarga responden untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi sangat besar (hampir 85%) namun terkendala oleh beberapa faktor seperti : a) faktor sarana transportasi, b) kurangnya biaya pendidikan (pendapatan keluarga yang tidak memadai) c) tidak adanya SLTA di desa, d) tidak ada jawaban.

Dari beberapa faktor tersebut ternyata yang memilih b nampaknya paling besar atau sebanyak 48 responden, hal ini memberikan petunjuk bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Lempake sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh faktor biaya. Hal ini sangat mudah dimengerti karena hampir 90% penduduk wilayah ini bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani dengan tingkat pendapatan yang relatif masih rendah.

Tingkat partisipasi politik masyarakat desa Lempake dilihat dari 7 indikator yang diteliti ternyata 3 diantaranya masih tergolong kategori rendah. Banyaknya faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat desa Lempake rendah dalam hal keikutsertaan dalam rapat-rapat politik, namun demikian hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa umumnya mereka tidak banyak memiliki waktu untuk datang pada kegiatan-kegiatan rapat-rapat politik. Bahkan ada beberapa responden yang bersifat acuh tak acuh terhadap kegiatan itu, hal ini tentunya sangat tidak diharapkan karena akan merugikan dirinya sendiri. Karena dari 7 indikator partisipasi politik yang diteliti terdapat 3 indikator yang masih rendah, maka dapat disimpulkan tingkat partisipasi politik masyarakat desa lempake masih termasuk kedalam kategori sedang. Oleh karena itu hendaknya pemerintah desa memberikan perhatian yang serius terhadap hal ini, karena dengan hanya melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan politik inilah maka aspirasi masyarakat, serta masalah yang dihadapi dapat diinformasikan pada lembaga yang kompeten yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tiap responden yang diteliti memiliki tingkat pendidikan yang berbeda satu sama lainnya dan dapat dibedakan ke dalam lima jenjang yaitu: tidak memiliki ijazah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan tamat Diploma. Masing-masing jenjang memiliki skor tertentu. Demikian pula untuk variabel partisipasi politik telah diteliti dengan tujuh indikator dengan 9 buah pertanyaan dimana setiap jawaban pertanyaan memiliki jenjang jawaban 5 (lima) gradasi dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5.

Kedudukan masing-masing responden pada setiap variabel memiliki jumlah skor tertentu. Dari hasil perhitungan diperoleh harga korelasi antara variabel tingkat pendidikan dengan variabel tingkat partisipasi politik masyarakat sebesar 0,935. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai rtabel pada tingkat signifikan 5% untuk $n = 60$ ternyata harga r hitung lebih besar daripada r tabel yaitu $0,935 > 0,254$. Hal ini berarti terdapat

hubungan positif antara variabel tingkat pendidikan dengan variabel tingkat partisipasi politik masyarakat atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan masyarakat desa Lempake sampai saat ini masih termasuk dalam kategori sedang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat, namun kendala yang paling besar dirasakan oleh warga dalam meningkatkan pendidikan adalah masih rendahnya tingkat pendapatan keluarga.
2. Dari tujuh indikator yang diteliti dalam partisipasi politik yaitu mengenai keikutsertaan masyarakat dalam keanggotaan partai politik atau keanggotaan kelompok kepentingan, keikutsertaan dalam rapat-rapat politik, keikutsertaan dalam diskusi / seminar politik, keikutsertaan dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah, keikutsertaan dalam berkampanye, keikutsertaan memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti perkembangan politik di media massa, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat desa Lempake termasuk dalam ketegori sedang.
3. Dari hasil analisis data diketahui bahwa nilai r hitung ternyata lebih besar dibandingkn nilai r tabel, hal ini mengandung arti bahwa pada taraf signifikan 5% ternyata antara variabel tingkat pendidikan dengan variabel partisipasi politik masyarakat terdapat hubungan yang positif, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Lurah Lempake, Rekan-rekan seprofesi, masyarakat desa Lempake, dan Ketua Lembaga Penelitian Unibraw yang telah menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almound, Gariel dan Verba, 1984. **Sidney, Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara**, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta, Bima Aksara.
- Apter, David E., 1997. **Pengantar Analisa Politik**, Terjemahan Setiawan Abadi, Jakarta, LP3ES.
- Budiardjo, Mariam, 1982. **Partisipasi dan Partai Politik**, Jakarta, PT. Gramedia.
- Dachnel, H.M., 1989. **Sistem Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi, Suatu Studi Perbandingan Antar Beberapa Negara**, Jakarta, Depdikbud.
- Hadi, Sutrisno, 1990. **Metodologi Research**, Yogyakarta, Andi Offset.
- Hoogerwerf, A., 1985. **Politikologi**, Terjemahan RLL. Tobing, Jakarta, Erlangga.
- Joesoef, Soelaimaan dan Santoso, Slamet, 1986. **Pendidikan Luar Biasa**, Surabaya, CV. Usaha Nasional.
- Kartono, Kartini, 1983. **Pengantar Metodologi Research**, Bandung, Alumni.
- Kweit, Marry Grazes dan Kweit, Robert. W., 1996. **Konsep dan Analisa Politik**, Terjemahan Ratnawati, Jakarta, Bina Aksara.
- Mashuri, 1973. **Kebijaksanaan dan Langkah-langkah Pembaharuan Pendidikan**, Jakarta, Departemen P & K.
- Napitupulu, W.P., 1979. **Dimensi-Dimensi Pendidikan**, Jakarta, Badan Penerbit Kristen